

IMPLEMENTASI SISTEM NON TUNAI PADA APLIKASI SISKEUDES TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA RANDEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

Oleh:

Hadi Istanto

Lailul Mursyidah

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Januari, 2024

Pendahuluan

Keuangan negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara dengan cara pengelolaan yang efektif dan efisien sesuai dengan sumber dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja, baik APBN maupun APBD. Dalam hal ini pemerintah harus berupaya agar segala bentuk penyimpangan yang terjadi pada transaksi penerimaan pendapatan dan transaksi pengeluaran pendapatan dapat dihindari, sehingga setiap rupiah dari pendapatan negara dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan tersebut, Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diluncurkan pada tahun 2015 dan pada saat ini Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Bekerjasama dengan BPR Delta Artha untuk pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa Se Kabupaten Sidoarjo. Diharapkan dengan adanya kedua aplikasi ini dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien.

Gap Permasalahan

Pada awalnya di Tahun 2017 Desa Sudah Diberikan Aplikasi pengelolaan keuangan Desa berbentuk SISKEUDES. Dan pada tahun 2020 terdapat pengembangan pada pengelolaan keuangan desa berupa program transaksi non Tunai yang bekerja sama dengan BPR Delta Artha. Namun, dalam pelaksanaannya baik dari aplikasi Siskeudes dan Aplikasi Non tunai BPR Delta Artha sering mengalami kendala, baik dari koneksi dan error pada saat penginputan maupun pada saat penatausahaan, tetapi Pada dasarnya pelaksanaan pengelolaan desa berupa siskeudes dan program Transaksi Non tunai ini sangat membantu memberikan dampak positif bagi aparatur desa. Selain itu dalam penerapan memberikan dampak positif dan memiliki peran yang penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa serta lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel.

Data Empiris



Terdapat berbagai macam menu dalam aplikasi Siskeudes ini mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban. Fitur dalam aplikasi ini dibuat secara sederhana dan memudahkan pengguna dalam pengoprasian aplikasi ini. Tetapi dalam penggunaannya masih sering terkendala koneksi yang sering error.



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Bekerjasama dengan BPR Delta Artha untuk pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa Se Kabupaten Sidoarjo. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti aplikasinya terkadang belum update sehingga terjadi ketidaksesuaian antara aplikasi non tunai dengan aplikasi siskeudes.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Implementasi Sistem Non Tunai Pada Aplikasi SISKEUDES Terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ?
2. Hambatan Apa saja yang dihadapi dalam Sistem Non Tunai dan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ?

Penelitian Terdahulu

Ada beberapa Penelitian yang relevan terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fitri Rosalina N, Samosir dkk (2022) yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi”
2. Kadek Ginanthi Asih dkk (2022) yang berjudul “Analisis Peenerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa pada masa Pandemi Covid-19”
3. Angela Ayu Wilma Anintyasaputri (2019) yang berjudul "Analisis Implementasi Aplikasi Siskeudes pada Desa Berbasis Teknologi Informasi"

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), metode analisis yang digunakan yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. KOMUNIKASI

Aspek komunikasi dengan segala rincian dan bentuknya adalah sesuatu kegiatan yang sangat penting bagi upaya membangun pemahaman, kesadaran dan kemudian kepatuhan dalam memenuhi atau melaksanakan sebuah kewajiban public. pemerintah Desa Randegan ini, penerapan aplikasi baik non tunai dan siskeudes telah berjalan sebagaimana mestinya. Sejalan dengan perkembangannya kegiatan komunikasi tidak hanya secara langsung melainkan dengan komunikasi secara digital sehingga komunikasi terkait pelaksanaan kegiatan desa lebih mudah dan efisien. Khususnya dalam hal pelaksanaan siskeudes. Komunikasi antara pengelola aplikasi dan pelaksana kegiatan harus terjalin dengan baik sehingga dapat terciptanya tujuan sesuai yang diharapkan

komunikasi tersebut juga dijalankan secara vertikal dan horizontal, proses komunikasi tersebut sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dengan baik dan dapat menjalankan aplikasi tata kelola keuangan desa baik SISKEUDES maupun aplikasi non tunai dengan baik pula.

Hasil dan Pembahasan

2. SUMBER DAYA

Sumber daya adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Sebagus apapun kebijakan tersebut, jika sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya terbatas, maka pencapaian tujuannya Desa Randegan kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini. Dalam setiap rekrutmen perangkatnya telah melalui tes dan kualifikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, jadi untuk penempatan setiap bagiannya sudah sesuai dengan keahliannya. Untuk perihal aplikasi siskeudes dan aplikasi non tunai dipangku oleh kaur keuangan yang dalam hal ini telah berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran (dana), sumber daya sarana dan prasarana (fasilitas) dan sumber daya informasi dan kewenangan ini harus ada dan saling melengkapi satu sama lain, kekurangan pada salah satunya akan menghambat pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Sumber daya manusia atau sumber daya pendukung berupa fasilitas, dana, dan informasi harus tersedia sehingga menghasilkan output sesuai dengan apa yang diharapkan

Hasil dan Pembahasan

berikut dokumentasi mengenai sumber daya sarana prasarana yang dipakai dalam operasional Aplikasi Non tunai dan siskeudes



Fasilitas yang dimiliki kaur keuangan untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes dan non tunai tersebut sudah cukup baik dan sangat mendukung. Jadi tidak hanya sumber daya manusia nya saja yang tercukupi tapi dari segi sumber daya lainnya juga sangat baik

Hasil dan Pembahasan

3. DISPOSISI/SIKAP

Disposisi adalah sikap atau kemauan para pelaksana kebijakan. Kemauan menentukan tingkat kesungguhan para pelaksana dalam bekerja. Sikap pelaksana merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan kerja serta kemauan para pegawai/ pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari hasil penelitian kami di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini bahwa tingkat kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa baik dari pengoprasionalan aplikasi keuangan baik dari siskeudes dan non tunai telah berjalan dengan sangat baik, hal ini ditunjang karena adanya perhatian dan bimbingan baik dari pimpinan di tingkat desa maupun tingkat kecamatan dan kabupaten seperti dengan diadakannya bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap tugas pokok dan masing-masing perangkat sehingga dapat melaksanakan tujuan pemerintahan desa dengan baik

Hasil dan Pembahasan

berikut kami lampirkan dokumentasi bimbingan teknis yang telah terlaksana,



Dari hasil penelitian dan observasi dilapangan, peneliti menilai kemampuan kerja serta kemauan para pegawai/ pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang khususnya kaur keuangan yang mengoprasionalkan kedua aplikasi ini sudah sangat baik

Hasil dan Pembahasan

4. STRUKTUR BIROKRASI

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. pembagian tugas menjadi sangat penting dalam pengelolaan aplikasi ini, yang dalam faktanya dalam hal perencanaan akan diisi oleh kaur perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan dalam hal penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pengaplikasian aplikasi non tunai dijalankan oleh kaur keuangan sesuai dengan tupoksinya pula. Tentunya kegiatan tersebut sesuai dengan arahan dan pengamatan pimpinan baik dari sekretaris desa maupun kepala desa. Dalam hal adanya aplikasi Siskeudes dan non tunai sangat membantu birokrasi yang dalam penelitian ini khususnya bagi pemerintah Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, adanya aplikasi ini diharapkan bisa memudahkan dan membantu menjalankan tujuan pemerintahan desa.

Hasil dan Pembahasan

. berikut kami lampirkan struktur organisasi Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo



kemampuan kerja sama antar kaur kasi dalam struktur birokrasi Pemerintah Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini berjalan dengan baik dan dapat menjalankan kebijakan pemerintahan sesuai dengan arahan dan tujuannya

Kesimpulan

Komunikasi yang telah dijalankan secara vertikal dan horizontal sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dengan baik, fasilitas yang dimiliki kaur keuangan untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes dan non tunai tersebut sudah cukup baik dan sangat mendukung. Jadi tidak hanya sumber daya manusia nya saja yang tercukupi tapi dari segi sumber daya lainnya juga sangat baik, terkait dengan disposisi/sikap, kemampuan kerja serta kemauan para pegawai/ pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang khususnya kaur keuangan yang mengoperasikan kedua aplikasi ini sudah sangat baik yang hal ini merupakan salah satu faktor untuk menjadikan tata kelola keuangan yang baik. kemampuan kerja sama antar kaur kasi dalam struktur birokrasi Pemerintah Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini berjalan dengan baik dan dapat menjalankan kebijakan pemerintahan sesuai dengan arahan dan tujuannya yang hal ini dapat menunjang terciptanya tata kelola keuangan yang baik pula

Ucapan Terima Kasih

Dengan rasa syukur dan penghormatan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Swt atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memungkinkan saya menyelesaikan jurnal dengan judul " Implementasi Sistem Non Tunai Pada Aplikasi SISKEUDES Terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo" Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala desa dan perangkat desa Randegan yang telah memberikan izin penelitian dan berbagi informasi yang sangat berarti terkait topik penelitian saya. Semoga penghargaan dan ucapan terima kasih ini dapat mencerminkan rasa hormat dan apresiasi saya kepada semua pihak yang telah membantu saya mencapai pencapaian ini.

Referensi

1. Abdullah R. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015
2. Poedjiyanto, A., Warjio, W., & Isnaini, I.. *Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil*. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(1), 43-51., 2019
3. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Ridwan, M. A *Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. 1–140.
6. BPKP. Kemendagri dan BPKP Luncurkan Aplikasi Siskeudes Rilis 2.0.3. Kominfo BPKP. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/26996/0/Kemendagri-dan-BPKP-Luncurkan-Aplikasi.2020>
7. Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. *Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa*. 20(2), 217–223. 2020
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 412.2/5493/438.5.8/2020 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa.
9. Ahmad Najib Akmal, *Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang) V*. 2023.
10. Kadek Ginanthi Asih, dkk, *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa versi 2.0.3 dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Desa pada masa pandemi covid*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi Vol.13 No.01. 2022.
11. Fitri Rosalina N Samosir dkk, *Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi*. Jurnal Perspektif Vol.11 2022.
12. Angela Ayu Wilma Anintyasputri dkk, *Analisis Implementasi Siskeudes pada Desa Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Perspektif Akutansi Vol. 02 Nomor 01. 2019.

